

## BAB II

### KONDISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

#### 2.1 Latar Belakang Terbentuknya RIS

##### 2.1.1 Proklamasi

Tanggal 17 Agustus merupakan tanggal bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pasalnya, pada hari itu Indonesia lahir sebagai negara merdeka. Namun, lahirnya NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) ini bukan tanpa halangan dan rintangan. Banyak sekali peristiwa yang terjadi sebelum Proklamasi yang dibacakan oleh Ir. Soekarno. Berikut adalah beberapa peristiwa penting sebelum lahirnya Proklamasi kemerdekaan NKRI 1945.

Peristiwa pertama yang terjadi sebelum lahirnya Proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah kekalahan Jepang dan kekosongan kekuasaan. Seperti kita ketahui, antara tahun 1942-1945 Indonesia berada dibawah penjajahan bangsa Jepang. Maka dari itu, kekalahan Jepang dalam PD II menjadi faktor utama lahirnya Proklamasi kemerdekaan. Karena Jepang kalah dari Sekutu dalam beberapa pertempuran, maka Jepang mulai mengobral janji. Janji itu dikenal dengan janji kemerdekaan, bila bangsa Indonesia sudi membantu Jepang dalam menghadapi Sekutu, maka nanti akan diberikan kemerdekaan.<sup>1</sup> Pada bulan Maret 1945 pihak Jepang mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang mengadakan pertemuan pada akhir bulan Mei di bangunan lama *Volskraad* di

---

<sup>1</sup> Adi Sudirman . *Sejarah Lengkap Indonesia ( Dari Era Klasik Hingga Terkini)*. Yogyakarta : Diva Pess Halm 279

Jakarta.<sup>2</sup>Dalam perkembangannya BPUPKI berubah menjadi PPKI. Namun, tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu tanpa syarat dengan ditanda tangannya Perjanjian Post Dam. Hal ini diumumkan melalui radio, dengan demikian di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Kejadian itu jelas mengakibatkan pemerintah Jepang tidak dapat meneruskan janji atau usahanya mengenai kemerdekaan Indonesia.<sup>3</sup> Sehingga proklamasi harus segera dilaksanakan, karena itu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia diperlukan suatu revolusi yang terorganisasi. Sukarno dan Hatta ingin memperbincangkan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan di dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), sehingga tidak menyimpang dari ketentuan pemerintah Jepang. Sikap inilah yang tidak disetujui oleh golongan muda, yang menganggap PPKI adalah badan binaan Jepang.

Peristiwa kedua yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan adalah perbedaan pendapat antara kalangan tua dan muda peristiwa itu dikenal dengan peristiwa Rengasdengklok. Adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan muda memuncak, dimana para pemuda mendesak agar tanggal 16 Agustus 1945 harus dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan, sedangkan pemimpin golongan tua masih menekan perlunya diadakan rapat PPKI terlebih dahulu.<sup>4</sup> Pada waktu itu, Soekarno dan Hatta yang merupakan tokoh-tokoh golongan tua menginginkan agar proklamasi dilakukan melalui PPKI. Sedangkan, golongan muda menginginkan agar proklamasi

---

<sup>2</sup> M.C. Ricklef . *Op. Cit.*, Halm 313

<sup>3</sup> Adi Sudirman . *Op. Cit.*, Halm 297

<sup>4</sup> Marwati Poesponegoro Djoened., *Sejarah Nasional Indonesia jilid VI*. Jakarta: Balai Pustaka halm 81

dilakukan secepatnya tanpa melalui PPKI yang dianggap sebagai badan buatan Jepang. Selain itu hal tersebut dilakukan agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Para golongan muda khawatir, apabila kemerdekaan yang sebenarnya merupakan hasil dari perjuangan bangsa Indonesia, menjadi seolah-olah merupakan pemberian dari Jepang.

Adanya perbedaan paham itu telah mendorong golongan pemuda untuk membawa Ir. Soekarno dan Hatta ke luar kota. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 03.00 WIB. Ir. Soekarno dan Hatta di bawa ke Rengasdengklok, Karawang, untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Ir. Soekarno dan Hatta serta Mr. Achmad Soebardjo dengan golongan muda tentang waktu proklamasi akan dilaksanakan.<sup>5</sup> Sementara itu di Jakarta antara Mr. Ahmad Subarjo dari golongan tua dengan Wikana dari golongan muda tercapai kata sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilakukan di Jakarta di mana Laksamana Maeda bersedia untuk menjamin keselamatan mereka selama berada dirumahnya.<sup>6</sup> Karena itu Jusuf Kunto dari pihak pemuda mengantarkan Mr. Ahmad Subarjo bersama sekretaris pribadinya Sudiro ke Rengasdengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Ahmad Soebarjo memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB.

---

<sup>5</sup> Adi sudirman,. *Op. Cit.*, Halm 299

<sup>6</sup> Marwati Poesponegoro Djoened. *Op. Cit.*, Halm 82

Pada hari jumat legi tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi (waktu Jawa), di bagian muka rumah jalan Penegasan Timur nomor 56, di Jakarta dibacakan sebuah “proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia” yang ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia.<sup>7</sup>

### PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.

Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Jakarta, 17 Agustus 1945

Atas nama Bangsa Indonesia

Soekarno-Hatta

Setelah diproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia, berarti bahwa bangsa Indonesia telah menyatakan secara formal, baik kepada dunia luar maupun kepada bangsa Indonesia sendiri, bahwa mulai saat itu bangsa Indonesia telah merdeka. Merdeka berarti bahwa mulai saat itu bangsa Indonesia telah siap untuk menentukan sendiri nasib bangsa dan nasib tanah airnya dalam segala bidang. Dalam hal kehidupan, kenegaraan. Berarti bangsa Indonesia akan menyusun negara sendiri. Oleh

---

<sup>7</sup> Joeniarto SH, *Sejarah ketatanegaraan* ( Jakarta: Bina Asara, 1984), cetakan kedua. Halm 2

karena itu pernyataan kemerdekaan bahwa mulai pada saat itu telah berdiri Negara baru, yaitu Negara Republik Indonesia.

Pada tanggal 18 Agustus Panitia Persiapan Kemerdeaan Indonesia bersidang untuk mengisi proklamasi yang telah diumumkan. Rencana undang-undang dasar yang telah disiapkan, dan tinggal menunggu pengesahan di bahas lagi secara cepat untuk disesuaikan dengan cita-cita bernegara.<sup>8</sup> Pengesahan undang-undang dasar adalah syarat mutlak, karena undang-undang dasar adalah tempat berdiri negara, berupa pedoman kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan. Menurut undang-undang dasar sistem pemerintahan yang harus di jalanan ialah demokrasi. Penerapan sistem demokrasi disesuaikan dengan keadaan setempat. Pokok utama dalam sistem demokrasi seperti yang digariskan oleh undang-undang dasar ialah turut sertanya rakyat dalam menentukan jalannya pemerintahan. Siapapun yang berkesempatan memegang pemerintahan, wajib menurut pola kebijakan yang telah digariskan oleh undang-undang dasar.

Proklamasi kemerdekaan menjadi permulaan atau titik awal pembelaan bagi negara merdeka Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia, berkembanglah kekuasaan de jure di seluruh kepulauan Indonesia dalam tangan rakyat dan pemerintah Indonesia. Proklamasi juga menjadi awal kekuasaan de facto seluruhnya di kepulauan Indonesia. Berdasarkan Proklamasi kemerdekaan terbentuklah

---

<sup>8</sup> DR. Slamet Muljana, kesadaran Nasional : *dari* kolonialisme sampai kemerdekaan . ( Jakarta: Inti Idayu Press,) , jilid 3. Halm 30-34

Negara Republik Indonesia, yang berusaha mewujudkan segala cita-cita bangsa Indonesia.<sup>9</sup>

Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 menjadi awal bangsa Indonesia guna menegakkan hak asasinya sebagai bangsa yang setara dengan bangsa lain. Bersamaan itu, Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 juga menjadi sumber dari segala hukum bangsa Indonesia. Melalui proklamasi tersebut, mulailah hukum nasional Indonesia di bumi nusantara ini. Proklamasi menjadi landasan bagi dihapusnya hukum kolonial, dan sekaligus sebagai permulaan untuk menggantinya dengan hukum yang lebih berpihak kepada manusia dan bangsa Indonesia. Dengan demikian, seharusnya Proklamasi 17 Agustus menjadi landasan hukum dan awal bagi kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia.

### **2.1.2 Diplomasi**

Diplomasi secara teori yaitu praktek pelaksanaan hubungan antar negara melalui perwakilan resmi. Diplomasi merupakan teknik operasional untuk mencapai kepentingan nasional di luar wilayah sebuah negara. Diplomasi dilakukan oleh Sutan Sjahrir untuk mendapatkan pengakuan internasional atas keberadaan Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat, baik secara *de jure* ataupun *de facto*. Pengakuan *de facto* harus memenuhi syarat sebuah negara memiliki unsur sebagai negara yang berdaulat, ada pemimpin, rakyat dan wilayah. Pengakuan *de jure* adalah pengakuan secara resmi dari dunia luar berdasarkan hukum internasional dan segala konsekuensinya.

---

<sup>9</sup> Haryono Rinardi. *Op. Cit.*, Vol 2 no 01

Pada 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Proklamasi hanya satu bentuk pencapaian untuk membuat Indonesia hadir sebagai negara yang berdaulat, dan otonom serta bebas dari campur tangan negara lain. Masa-masa awal kemerdekaan, Indonesia dihadapkan pada satu masalah besar disamping banyak masalah lainnya. Masalah tersebut adalah belum adanya pengakuan Internasional yang luas atas kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Belanda tidak mengakui keberadaan Indonesia karena dianggap bentukan Jepang yang berbau fasisme. Belanda juga menganggap masih mempunyai kekuasaan di Hindia Belanda, sebutan Indonesia oleh pemerintahan Belanda.

Para tokoh republik Indonesia menyambut baik kedatangan tentara Sekutu dikerenakan apa yang akan dilakukan di Indonesia sebagai tugas masyarakat internasional oleh hukum Internasional dan dirasakan baik untuk perdamaian. Namun, kedatangan Sekutu yang membawa orang-orang NICA (Natherlands Indies Civil Administration) meresahkan dan menimbulkan ancaman untuk kedaulatan republik Indonesia yang baru seumur jagung. Belanda terus menurus memancing perang dengan Indonesia hingga akhirnya ibu kota Jakarta harus dipindahkan ke Yogyakarta pada 4 januari 1946. Dari Yogyakarta ibukota dipindahan ke Bukittinggi yang dikenal dengan pemerintahan darurat Indonesia.<sup>10</sup>

Belanda yang pernah menjajah Indonesia selama tiga setengan abad tidak mengakui kedaulatan Indonesia lebih tepatnya tidak mengakui berdirinya Negara

---

<sup>10</sup> Mestika zeid. *Pemerintahan Darurat Republik Indonesia*(.Jakarta: Pustaka Utama Graffiti. Halm 1

Indonesia yang di proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Berbagai cara dilakukan Belanda melalui tuduhan bahwa Indonesia merupakan tempat para pemberontak, pengacau dan pembunuh yang semua dianggap sebagai “ perilaku buruk republiken”.<sup>11</sup> Beberapa kelompok pejuang Indonesia merespon kehendak Belanda dengan pertempuran, perlawanan rakyat Indonesia yang banyak memakan korban akhirnya menggiring Sekutu, Belanda dan Indonesia duduk dimeja perundingan untuk memperbincangkan permasalahan yang terjadi. Tentara Sekutu diwakili Letnan Jendral Christison, Belanda oleh Van Mook dan Indonesia diwakili Sutan Sjahrir. Letnan jendral Christison merupakan pemakarsa pertemuan ini, bermaksud mempertemukan pihak Belanda dan Indonesia, namun pertemuan ini berakhir tanpa hasil apapun.<sup>12</sup> Untuk sedikit mendinginkan suasana Belanda dan Sekutu melalui jenderal Cristison mau mengakui Negara Indonesia secara de facto.

Nasib Indonesia memerlukan pembicaraan ulang antara pihak Indonesia dan Belanda. Belanda dengan berbagai kepentingannya di Indonesia masih mempertanyakan kedaulatan negara Indonesia dan keberadaan republik Indonesia. Inilah yang menjadi pemicu perbincangan selanjutnya dalam perundingan antara republik Indonesia dan Belanda. Dalam menyia-nyiakan dan merespon tingkah laku Belanda yang mulai membahayakan kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia, pejuang Indonesia terbagi dua kelompok. Kelompok Sutan Sjahrir memutuskan untuk menggunakan jalan diplomasi dan menghindari peperangan, yang dikenal saat ini

---

<sup>11</sup> Tempo, *Sutan Sjahrir; peran besar bung kecil*. Jakarta : Tempo, 2009 . Halm 55

<sup>12</sup> Sekretaris Negara. *30 Tahun Indonesia Merdeka*. Jakarta PT. citra lamtaro Gung Persada  
Halm 44

dengan istilah diplomasi sjahrir. kelompok lainnya yaitu kelompok Tan Malaka bersiap menggunakan diplomasi bambu runcing, untuk angkat senjata melawan Belanda. Walaupun esensi kedua cara ini berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu kemerdekaan Indonesia.

Ketika Sutan Sjahrir tampil di panggung internasional untuk berunding dengan Belanda, istilah diplomasi belum banyak dikenal di Indonesia. Apa yang dilakukan Sutan Sjahrir dengan memilih jalan diplomasi mendapat tanggapan pro dan kontra di dalam negeri. Kelompok penentangannya menuduh Sutan Sjahrir tidak mempunyai semangat nasionalisme. Berunding dengan penjajah tidak mengangkat senjata dan tidak bersedia mengambil tindakan militer, dianggap sebagai tindakan penghianatan oleh pejuang revolusioner. Hal yang menarik adalah sekalipun menghadapi penentang di dalam negeri, Sutan Sjahrir tetap yakin diplomasi damai itulah jalan terbaik untuk Indonesia. Nyatanya Sutan Sjahrir mampu menyakinkan Belanda bahwa Republik Indonesia bukanlah bikinan Jepang.<sup>13</sup>

### **2.1.3 Periode Linggarjati**

Pihak Belanda mencapai kesepakatan diplomasi mereka yang pertama dengan Republik pada bulan November 1946. Pihak Inggris telah mendesak tercapainya suatu kesepakatan sebelum menarik semua pasukan mereka dari Jawa dan Sumatera pada bulan Desember. Pada bulan Oktober perundingan-perundingan dimulai dan disepakati suatu gencatan senjata di Jawa dan Sumatera. Pada tanggal 12 November, di Linggarjati (didekat selatan Cirebon), Belanda mengakui Republik sebagai

---

<sup>13</sup> Tempo, Op. Cit., halm 45

kekuasaan *de facto* di Jawa, Madura, dan Sumatra kedua pihak sepakat untuk bekerja sama dalam pembentukan (pada tanggal 1 Januari 1949) suatu negara Serikat yang berbentuk federal.<sup>14</sup> Hasil perundingan diumumkan pada tanggal 15 November 1946, dan telah tersusun sebagai naskah persetujuan yang terdiri atas 17 pasal. Naskah ini kemudian di paraf oleh kedua belah pihak untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah masing-masing. Isi naskah antara lain adalah:<sup>15</sup>

- Pemerintah RI dan Belanda bersama-sama menyelenggarakan berdirinya sebuah negara berdasarkan federasi, yang di namai *Negara Indonesia Serikat (RIS)*
- Pemerintah RIS akan bekerja sama dengan pemerintah Belanda membentuk Uni Indonesia- Belanda.

Setelah naskah diparaf, timbul berbagai macam tanggapan dari masyarakat Indonesia, ada yang pro dan kontra naskah persetujuan itu. Beberapa partai politik menyatakan menentang yaitu *Masyumi, Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Wanita, Angkatan Komunis Muda (Acoma), Partai Rakyat Indonesia, Laskar Rakyat Jawa Barat*, Sedangkan yang mendukung adalah *PQAI, Pesindo, BTI, Laskar Rakyat, Partai Buruh, Partai Kristen Indonesia dan Partai Katolik*.<sup>16</sup> Persetujuan perdamaian ini hanya akan berlangsung singkat. Kedua belah pihak saling tidak mempercayai dan pengesahan persetujuan ini, di kedua negara menimbulkan

---

<sup>14</sup> M.C. Ricklef. *Op. Cit.*, Halm 337

<sup>15</sup> Marwati Poesponegoro Djoened. *Op. Cit.*, Halm 132

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm 132-133

pertikaian-pertikaian politik yang sengit mengenai konsesi-konsesi yang telah dibuat.<sup>17</sup>

Pertikaian antara Republik dengan Belanda terus meningkat. Pertikaian ini berwujud perang interpretasi dan perang bersenjata. Belanda membuat tafsir-tafsir sendiri, yang dimungkinkan oleh susunan-susunan kalimat dalam persetujuan Linggarjati. Sementara itu tentaranya Belanda mengalir terus ke Indonesia yang merupakan pelanggaran terhadap persetujuan tanggal 14 Oktober 1946 tentang gencatan senjata dan status quo.<sup>18</sup>

Perjanjian Linggarjati sudah ditandatangani di istana Rijswijk, istana Merdeka sekarang, pada tanggal 25 Maret 1947 yang menyatakan bahwa Belanda mengakui kekuasaan *de facto* Republik di Sumatera, Jawa, dan Madura. Ketika perjuangan diplomasi meningkat pada suatu pengakuan *de facto* terhadap RI dengan ini mulai mendapat perhatian internasional dalam forum PBB. Tetapi Belanda membuat ulah dengan mengarang tafsiran sendiri atas persetujuan itu Belanda mendesak agar dibentuk *gendarmarie*, semacam polisi yang bersama-sama dengan pasukan kita berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban didaerah Republik, yang berarti tentara Belanda boleh masukke dalam wilayah negara Indonesia. Desakan itu disertai dengan berbagai ancaman, dan akhirnya malahan dengan ultimatum.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> M.C. Ricklef. *Op. Cit.*, Halm 337

<sup>18</sup> Nasution. *Sekitar Perang kemerdekaan Indonesia (Linggarjati)*. Bandung: Angkasa Bandung. Halm 265

<sup>19</sup> Marwati Poesponegoro Djoened. *Op. Cit.*, Halm 136

#### 2.1.4 Agresi Militer Belanda I

Setelah penandatanganan naskah Persetujuan Linggarjati, pertentangan antara kedua belah pihak makin lama makin meruncing. Berbagai pertikaian yang dahulu menghalangi penandatanganan naskah persetujuan tersebut, yang untuk sementara diabaikan dengan harapan bahwa kemudian akan terbukti juga manfaat naskah itu, semakin nyata tampil kembali. Secara psikologis, kepercayaan pada kedua belah pihak tentang pelaksanaan naskah Linggarjati, telah runtuh.

Pada tanggal 20 Juli 1947 tengah malam pihak Belanda melancarkan ‘aksi Agresi Militer’ mereka yang pertama. Pasukan-pasukan bergerak dari Jakarta dan Bandung untuk menduduki Jawa Barat, dan dari Surabaya untuk menduduki Madura dan Ujung Timur. Gerakan-gerakan pasukan yang lebih kecil mengamankan wilayah Semarang, Belanda menguasai semua pelabuhan di Jawa, dan perkebunan di Sumatra. Beberapa orang Belanda, termasuk Van Mook, ingin melanjutkan merebut Yogyakarta dan membentuk suatu pemerintahan republik yang lebih lunak, tetapi pihak Amerika dan Inggris yang tidak terima aksi tersebut mengiring Belanda untuk segera menghentikan penalukkan sepenuhnya terhadap republik<sup>20</sup>

Karena itu timbul reaksi seluruh dunia, masalah Indonesia dimasukkan kedalam acara sidang dewan keamanan pada tanggal 31 Juli 1947 Australia menyusulan atas dasar pasal 39 piagam PBB, dewan keamanan agar mengambil tindakan terhadap suatu usaha yang mengancam perdamaian dunia. Aksi militer yang dilakukan terhadap RI oleh Belanda itu merupakan suatu ancaman terhadap

---

<sup>20</sup> M.C. Ricklef. *Op. Cit.*, Halm 338-339

perdamaian. Kedudukan Republik Indonesia semakin kuat dan sejak itu organisasi Internasional tersebut memberikan jasa-jasa baik untuk penyelesaian sengketa Indonesia dengan Belanda.<sup>21</sup>

Atas tekanan Dewan keamanan PBB, tanggal 15 Agustus 1947 pemerintah Belanda akhirnya menyatakan menerima resolusi Dewan keamanan untuk menghentikan pertempuran. Agresi Militer 1 merupakan serangan serentak yang dilakukan Belanda terhadap daerah-daerah di Republik Indonesia. Perbedaan penafsiran terhadap perjanjian Linggarjati yang ditandatangani tanggal 25 Maret 1947 merupakan faktor utama terjadinya serangan ini. Pihak Belanda menganggap ” kerja sama” dalam pasal 2 perjanjian tersebut sebagai kedaulatan Belanda di Indonesia tetap berlangsung sampai terbentuknya Negara Indonesia Serikat. Pihak Indonesia mengartikan “kerjasama” dalam pasal tersebut sebagai suatu kerja sama dengan pertanggungjawaban bersama dalam membentuk federasi dengan kedudukan yang setara.<sup>22</sup>

Dewan keamanan kemudian menawarkan suatu komisi jasa-jasa baik sebagai suatu kompromi, yang kemudian terkenal dengan sebutan komisi Tiga Negara (KTN). Anggota KTN seorang dipilih oleh Indonesia, seseorang dipilih oleh Belanda, sedangkan kedua anggota itu memilih anggota ketiga. Pemerintahan Republik Indonesia memilih Australia. Pemerintahan kerajaan Belanda memilih Belgia,

---

<sup>21</sup> Marwati Poesponegoro Djoened. *Op. Cit.*, Halm 136

<sup>22</sup> Garda Maeswara. *Sejarah Revolusi Indonesia 1945-1950 (Perjuangan Bersenjata dan Diplomasi untuk Mempertahankan Kemerdekaan)*. Jakarta: Buku seru. Halm 143

sedangkan kedua negara tersebut memilih Amerika Serikat sebagai anggota ketiga. KTN dapat bekerja secara efektif setelah para anggotanya datang di Indonesia pada tanggal 27 Oktober 1947. Sejak dieluarkannya resolusi Dewan keamanan pada tanggal 1 November 1947, maka tugas KTN bukan lagi hanya di bidang politik saja, tetapi juga bidang militer.<sup>23</sup>

### 2.1.5 Periode Renville

Setelah Dewan keamanan berhasil mengatasi kemacetan dalam perdebatan tentang Indonesia, berdasarkan usul komkromis Amerika, pada tanggal 1 November 1947 Dewan dapat menyanghiri pembahasan pertikaian Belanda dengan Indonesia babak kedua, yang pada dasarnya mengharapkan, supaya pihak Belanda dan Indonesia dapat mencapai kesepakatan dengan perantaraan komisi Tiga Negara (KTN).<sup>24</sup>

Kontak pendahuluan yang diadakan oleh KTN dengan kedua belah pihak yang bersengketa itu menunjukkan bahwa masing-masing pihak tak mau bertemu di wilayah yang dikuasai pihak lainnya. Karena itu kedua belah pihak akhirnya menerima baik tawaran pemerintah Amerika Serikat yang menyediakan kapal angkut pasukan *Renville* sebagai tempat perundingan netral.

KTN memulai usahanya untuk memecahkan pertikaian dibidang militer, khusus yang menyangkut daerah demarkasi dan senjata. Pihak Belanda

---

<sup>23</sup> Marwati Poesponegoro Djoened. *Op. Cit.*, Halm 137

<sup>24</sup> K.M.L Thobing. *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia (Renville)*. Jakarta: Mides Surya Grafindo Halm 8

menginginkan agar lebih dulu menyetujui pemecahan pertikaian militer dari pada penyelesaian masalah politik. Sebaliknya pihak Indonesia menghendaki kedua masalah itu, yaitu masalah militer dan politik, diselesaikan secara bersama-sama, sebab justru kekuatan TNI dan gerilya rakyatnya menjadi tulang punggung perjuangan politik Republik Indonesia. Pihak Indonesia bersedia menghentikan gerilya asal pengakuan kedaulatan Republik Indonesia mendapat penyelesaian yang wajar. Pihak Belanda menginginkan dihentikannya perlawanan rakyat terlebih dahulu, dan baru kemudian merundingkan pemecahan masalah politik yang menjadi sumber sengketa. Akhirnya setelah melalui beberapa kompromi, kedua belah pihak setuju membentuk suatu komisi bersama baik dipusat maupun daerah-daerah.<sup>25</sup>

secara resmi perundingan baru dimulai tanggal 8 Desember 1947 di kapal *Renville*. Dengan melalui prosedur yang sulit, KTN berunding, secara informal dan melakukan desakan-desakan secara halus terhadap kedua belah pihak. Maka menjelang hari natal 1947, KTN mengajukan pesan Natal yang berisi hal pokok, pertama berdiri tegak ditempat dan penghentian tembak menembak dengan segera, kedua pengulangan kembali pokok dasar dari persetujuan Linggarjati.<sup>26</sup> Selanjutnya pada sidang tanggal 9 Desember 1947 KTN mengajukan sebuah skema persetujuan kepada delegasi Belanda dan Indonesia untuk disetujui sebagai garis demarkasi efektif, yang berisi usulan supaya pihak Belanda mengosongkan berbagai daerah yang diduduki dan sebaliknya tentara Republik mengosongkan seluruh ” daerah kantong” yang diduduki. Pihak Belanda menolak skema KTN . mereka mengajukan usul lain,

---

<sup>25</sup> Marwati Poesponegoro Djoened. *Op. Cit.*, Halm 138

<sup>26</sup> *Ibid.*, Halm 138

yaitu garis demarkasi berdasarkan “ garis van Mook” yang disahkan pemerintahan Hindia Belanda tanggal 5 September 1947. Usul tersebut ditolak dan dikritik secara pedas oleh Delegasi Republik.<sup>27</sup>

Dalam keadaan memuncak, pada tanggal 9 januari 1948, Belanda mengajukan ultimatum, jikalau Republik menolak maka Belanda menganggap dirinya tidak terikat lagi pada perintah gencatan senjata dan aan meneruskan aksi militernya ke yogya. Untuk kesekian kalinya KTN berusaha membujuk Republik, supaya mau menerima tuntutan Belanda. Sementara itu mereka menyakinkan Republik, bahwa penerimaan itu sama sekali tidak akan melemahkan Republik, tetapi justru akan memperkuat posisinya di forum Internasional.

Dalam kesadaran itulah pemerintah Republik menyetujui bujukan KTN untuk menerima “ garis van Mook” menjadi garis demarkasi efektif, sehingga dapatlah ditandatangani dua perjanjian *Renville* masing-masing pada tanggal 17 Januari 1948 dan pada tanggal 19 januari 1948, yang antara lain berisi: “ Perjanjian Gencatan Senjata, 12 Dasar-dasar perundingan Politik. kemudian atas gagasan KTN, untuk menghindarkan kesimpangsiuran mengenai pokok-pokok perundingan politik yang akan diadakan tanggal 19 Januari ditandatangani jugalah : 6 Dasar-dasar tambahan pada dasar-dasar perundingan politik.<sup>28</sup>

Sebagai konsekuensi persetujuan *Renville*, Republik harus mengundurkan ( evakuasi) pasukan-pasukan bersenjataanya dari daerah di belakang “ garis van Mook”

---

<sup>27</sup> K.M.L Thobing. *Op. Cit.*, Halm 28

<sup>28</sup> *Ibid.*, Halm 32

yang sudah disetujui sebagai garis demarkasi. Dan karena waktu pengunduran itu sangat pendek, pemerintah Republik harus segera mengambil langkah-langkah untuk melaksanakannya. Pemberitahuan itu sangat memukul perasaan orang-orang Siliwangi yang sudah begitu keras berusaha merorganisasikan dan memperkuat barisan-barisannya, sehingga mereka sudah menjadi potensi harus ditakuti tentara Belanda, karena sudah dapat membahayakan stabilitas kekuasaan mereka, khususnya Jawa Barat, termasuk Jakarta.<sup>29</sup>

Setelah 4 babak perundingan itu, yang dapat diselesaikan hanyalah kepentingan Belanda, seperti penghijrahan TNI dan izin kooperasi pegawai RI dengan Belanda, bahkan Belanda telah berhasil mengkonsolidasikan daerah-daerah pendudukannya secara politis, melahirkan negara-negara baru, mengadakan konferensi federal untuk mengatur rencana tatanegra NIS, membentuk pemerintahan federal sementara dengan tidak mengajak RI untuk turut merundingkannya. Dengan kekuatan politik, militer dan ekonomi yang ada, Belanda dapat mempergunakan “*Renville*” untuk memperkuat kedudukannya dan secara lebih ketat lagi mengepung dan menekan RI. Sebaliknya RI dengan kelemahan politik, militer dan ekonomi, yang sebagian besar diakibatkan oleh “*Renville*” tidak mampu memanfaatkan perjanjian itu untuk mencapai tujuannya. Keadaan jauh lebih sulit dari pada di masa “*Linggajati*”. Semua kepandaiaan para politisi untuk menyerang Belanda dengan

---

<sup>29</sup> Ibid., Halm 44

argumentasinya yang jitu dan atas dasar “ *Renville*”. Dengan sokongan yang layak dari KTN, tidak berguna, karena menghadapi kenyataan kuatnya posisi Belanda<sup>30</sup>

Tanggal 13 Januari 1948 van Mook meresmikan berdirinya Dewan Sementara Indonesia Serikat. Dalam kata pengukuhannya van Mook menyebut, bahwa pada pokok dewan itu bertugas untuk segera mempersiapkan pembentukan Pemerintahan Indonesia Serikat Sementara. Diperingatkan, bahwa pembentukan tersebut sangat dipengaruhi oleh keinginan rakyat di daerah-daerah. Oleh sebab itu harus diusahakan, supaya di daerah-daerah dapat dibangun keamanan dan ketertiban, supaya penduduk dapat secara leluasa menentukan bentuk pemerintahan yang mereka inginkan. Pada akhirnya van Mook menyatakan harapan, bahwa dalam waktu dekat Republik juga mau menggabungkan diri dalam badan ini, sehingga dapat dicapai suatu perserikatan yang baik di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga tanggal 9 Maret 1948 berdasarkan keputusan Pemerintahan Belanda, Letnan Gubernur Jenderal van Mook mengukuhkan berdirinya Pemerintahan Sementara Negara Indonesia Serikat di Istana Rijswijk.<sup>31</sup>

Pada 9 Maret Belanda menyatakan bahwa RI akan diikuti sertakan juga dalam mendirikan Pemerintahan Federal Sementara setelah penyelesaian final dari pertikaian RI dan Belanda tercapai. Usaha RI untuk terus memperluas hubungannya dengan luar negeri dianggap bertentangan pula dengan persetujuan Renville. Belanda menuntut pula agar pelaksanaan persetujuan Renville diawasi secara ketat. Tetapi

---

<sup>30</sup> Nasution. *Sekitar Perang kemerdekaan Indonesia (Renville)*. Bandung: Angkasa Bandung. Halm 327-228

<sup>31</sup> Nasution. *Op. Cit.*, Halm 229

kedua belah pihak saling melempar tanggung jawab atas terjadinya pertempuran lokal di sepanjang garis van Mook.<sup>32</sup>

### **2.1.6 Agresi Militer Belanda II**

Perang kolonial yang pertama terhadap Republik berakhir dengan sangat tidak memuaskan bagi Belanda. Belanda dapat menguasai daerah-daerah di perkebunan – perkebunan, sehingga dengan demikian Belanda dapat menarik keuntungan dari penghasilan perkebunan-perkebunan itu dan menyelamatkan Belanda dari kebangkrutan. Namun dipandang dari sudut politik, Belanda tidak maju, melainkan mundur. Masalah Indonesia sudah menjadi masalah Internasional, kedudukan Republik dan kedudukan Belanda sejajar sebagai dua negara yang sedang bersengketa. Dipandang dari sudut militer, Belanda berhasil menduduki daerah-daerah Republik yang cukup luas, tetapi kekuatan militernya tidak dapat menguasai daerah itu dan tidak dapat memelihara keamanannya. Kekuatan militer Republik tidak berhasil dilumpuhkan, walaupun banyak TNI-TNI terpecah ataupun tercerai-berai selama operasi militer Belanda berjalan, tetapi pasukan-pasukan Republik dapat segera menyusun kekuatan kembali di daerah-daerah pendudukan Belanda untuk melakukan serangan atau gangguan-gangguan terhadap Belanda.

Dengan berakhirnya pemberontakan PKI, pimpinan Angkatan Perang mulai memikirkan kembali mengenai kemungkinan serangan militer Belanda. Berdasarkan perkiraan keadaan setelah diterimanya Persetujuan *Renville*, Belanda berusaha mengepung Republik Indonesia, secara politis, ekonomis dan militer. Gejala-gejala

---

<sup>32</sup> Moedjanto. *Op. Cit* Halm 25

akan datangnya suatu serangan militer telah dirasakan oleh pimpinan Angkatan Perang, sejak Belanda mencoba mengulur waktu mengenai perundingan pelaksanaan Persetujuan *Renville*. Di beberapa tempat tentara Belanda melakukan pemindahan pasukan ke dekat garis demarkasi.<sup>33</sup>

Akhirnya persetujuan *Renville* dibatalkan, kabar pertama pembatalan persetujuan *Renville* di Yogya berupa serbuan Belanda pada 19 Desember 1948 jam 5.30 pagi. Penyerangan dilakukan dengan pengeboman atas Maguwo dan beberapa bangunan penting di Yogya, seperti RRI. Lalu diikuti dengan penerjunan 900 pasukan payung dan kemudian kesatuan-kesatuan lain. Pasukan Belanda yang dikirim ke Yogya pernah mendapat latihan KKO-AS di Virginia, jadi bukan sembarang tentara. memasuki Yogya mereka dibantu oleh KNIL, pasukan Belanda terdiri dari orang-orang pribumi. Tentara Belanda kemudian menawan Presiden dan Wakil Presiden, Syahrir (Penasehat Presiden) sejumlah menteri termasuk Menlu Agus Salim. Tetapi sebelum mereka ditawan, presiden masih sempat mengirimkan radiogram yang berisi pemberian kekuasaan negara kepada Menteri kemakmuran Syafruddin Prawiranegara, untuk membentuk Pemerintahan darurat RI (PDRI).<sup>34</sup>

Namun begitu Belanda masih belum mau menerima Republik sebagai suatu faktor politik yang Mutlak dalam usaha mencari penyelesaian masalah tata negara di Indonesia. Belanda tetap meneruskan keinginannya untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan semula, yaitu pembentukan negara Indonesia Serikat yang

---

<sup>33</sup>Marwati Poesponegoro Djoened. *Op. Cit.*, Halm 158

<sup>34</sup> Moedjanto. *Op. Cit* Halm 42

bergabung dengan Belanda dalam suatu Uni Belanda-Indonesia dan Belanda juga hendak mendirikan suatu pemerintahan federal sementara. Tanpa kedua negara ciptaannya ini, konsep Belanda itu pun ambruk. Disamping kesulitan-kesulitan politik yang dihadapi Belanda dalam usaha mencapai tujuan yang diimpikannya, keadaan keamanan di daerah-daerah yang mereka duduki sama sekali tidak bisa dijaganya.

Setelah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) terbentuk di Sumatera dan dengan jatuhnya Yogya ke tangan Belanda dan tertangkapnya Presiden dan Wakil Presiden, besar kemungkinan Belanda akan mempersoalkan di forum internasional Legalitas perwakilan-perwakilan RI, terutama di PBB. Dengan adanya PDRI maka permasalahan itu tidak pernah muncul. PDRI meneruskan legalitas yang sejak semula didapat dari pemerintahan RI di Yogya. Pada tanggal 24 Desember diterima resolusi yang menganjurkan penghentian tembak-menembak dan pembebasan pemimpin-pemimpin Republik. Terhadap resolusi ini PDRI, mengambil sikap, antara lain sebagai berikut:<sup>35</sup>

Resolusi Dewan keamanan PBB tanggal 24 Desember dapat diterima dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pemimpin-pemimpin Republik yang ditawan harus segera dibebaskan
2. Tentara Belanda harus ditarik mundur ke garis sebelum tanggal 18 Desember 1948
3. Kedaulatan Republik atas Jawa, Sumatera dan Madura harus diakui baik *de facto* maupun *de jure*.

---

<sup>35</sup>Aboe bakar loebis. *Op. Cit.*, Hal 276

4. Pembentukan pemerintahan Indonesia yang demokrasi tanpa campur tangan Belanda
5. Penarikan mundur seluruh tentara Belanda selekas-lekasnya dari Indonesia.

Pada tanggal 28 Januari 1949 diterima lagi resolusi tentang Indonesia yang menyebutkan tanggal-tanggal pasti mengenai penyusunan tata negara baru Indonesia di Indonesia:

1. Sebelum tanggal 15 Maret 1949 sudah harus terbentuk Pemerintahan Federal Sementara, dan Republik serta negara-negara bagian lain harus turut serta.
2. Sebelum tanggal 1 Oktober 1948 sudah mesti diadakan pemilihan umum secara rahasia untuk memilih majelis penyusun undang-undang dasar atau konstituante
3. Sebelum tanggal 1 Januari 1950, kedaulatan sudah harus di serahkan kepada Indonesia.
4. Usaha ini akan diawasi dan bantu oleh komisi PBB untuk Indonesia ( UNCI) yang menggantikan komisi Jasa-jasa Baik.

Resolusi ini sudah memuat pokok-pokok resolusi yang diterima oleh konferensi Asia. Tentang Indonesia di New Delhi pada tanggal 23-25 Januari 1949.

Sementara itu TNI dalam waktu kurang lebih satu bulan sudah selesai dengan konsolidasinya dan sudah mulai memberikan pukulan-pukulan kepada tentara

Belanda. Pertama kali yang menjadi sasaran adalah garis-garis komunikasi Belanda: kawat-kawat telepon diputuskan, jalan kereta api dirusak dan konvoi-konvoi Belanda di siang hari dihadang dan diserang. Karena itu pihak Belanda terpaksa memperbanyak pos-pos di sepanjang jalan-jalan besar yang menghubungkan kota-kota yang telah didudukinya. Dengan demikian manpowernya habis terpaku pada ribuan pos kecil di seluruh daerah Republik yang kini merupakan satu medan gerilya yang luas.

Setelah pasukan-pasukannya tersebar luar kota-kota yang didudukinya, TNI mulai menyerang kota-kota itu sendiri. Serangan Umum 1 Maret 1949 pada siang hari terhadap kota Yogyakarta yang dipimpin oleh letnan kolonel Soeharto yang berhasil menduduki kota itu selama enam jam, dengan terang benderang membuktikan kepada dunia bahwa inisiatif TNI sudah beralih dari pihak tentara Belanda ke pihak TNI. Kini TNI yang menyerang dan pihak Belanda yang bertahan.<sup>36</sup> Jalan buntu di bidang militer di barengi dengan acaman Amerika Serikat untuk mencabut bantuan *Mashall Plan*, akhirnya memaksa Belanda untuk menerima KMB yang bermuara kepada pengakuan kedaulatan sesuatu negara Indonesia terhadap wilayah bekas Hindia-Belanda.

Atas inisiatif UNCI, diselenggarakanlah perundingan RI-Belanda yang dipimpin oleh Mark Cochran asal Amerika Serikat di Hotel Desindies, Jakarta. Delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. J.H. Van Royen, sedangkan Delegasi RI dipimpin oleh Mr. M. Roem dan wakilnya Mr. Ali Saatroamidjojo. Perundingan yang

---

<sup>36</sup> Marwati Poesponegoro Djoened. *Op. Cit.*, Halm 162

dikenal dengan nama perundingan Roem-royen ini baru ditanda tangani tanggal 7 mei 1949.

Perundingan tersebut antara lain berisi:

1. Pihak RI-Belanda bekerja sama mengembalikan perdamaian, menjaga keamanan dan ketertiban.
2. Membebaskan tanpa syarat para pemimpin RI dan tahanan politik lainnya, yang ditangkap sejak 19 Desember 1948
3. Turut serta dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Hag.

Menindaklanjuti resolusi Dewan keamanan PBB, tentara Belanda yang masih berada di Yogyakarta dipersiapkan dibawah pengawasan UNCI. Penarikan tentara Belanda dari Yogyakarta dimulai tanggal 24 sampai dengan 29 Juni 1949. Bersama dengan itu, tanggal 29 Juni 1949, TNI juga masukke Yogyakarta. Setelah TNI masuk kembali ke kota Yogyakarta, Soekarno-Hatta selaku Presiden dan Wakil Presiden juga kembali ke Yogyakarta tanggal 6 Juli 1949. Di Yogyakarta di gelar Konferensi Inter Indonesia antara RI dan Bijzonder Federal Overleg ( BFO), membahas langkah-langkah kedua pihak dalam menyambut KMB. BFO merupakan negara-negara boneka buatan Belanda yang dipelopori oleh Van Mook dalam memecah belah kekuatan Indonesia. Konferensi tersebut berlangsung hingga 22 Juli 1949.<sup>37</sup>

Hasil terpenting konferensi ini, yakni kesepakatan tentang pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) dengan TNI sebagai intinya.

---

<sup>37</sup> Garda Maeswara. *Op. Cit.*, Halm 201-203

Akhirnya pada tanggal 3 Agustus 1949, Presiden Soekarno, selaku Panglima Tinggi APRI, melalui RRI memerintahkan para gerilyawan untuk menghentikan tembakan-menembak di seluruh Indonesia hal tersebut juga dilakukan pihak Belanda melalui Wakil Tinggi Mahkota Lovink. Karena masalah teknis, perintah itu baru terlaksana pada 10 Agustus untuk Jawa dan 14-15 Agustus untuk luar Jawa.

### **2.1.7 Periode KMB**

Dari tanggal 23 Agustus sampai tanggal 2 November 1949 diselenggarakanlah suatu konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, yang menjadi ketua KMB ialah PM Belanda, Dress. Delegasi Belanda dipimpin oleh van Maarseveen, RI oleh Hatta dan BFO oleh Sultan Hamid H dan UNCI bertindak sebagai moderator.<sup>38</sup> Beberapa pertemuan antara Indonesia dan Belanda dilakukan guna menyelesaikan masalah lewat diplomasi, Perundingan Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Roem-Royen, dan akhirnya dilaksanakanlah konferensi Meja Bundar ini. Adapun tujuan tujuan KMB itu adalah untuk menyelesaikan persengketaan antara Indonesia dan Belanda secepat-lekasnya dengan cara yang adil dan pengakuan kedaulatan yang nyata, penuh dan tanpa syarat kepada Republik Indonesia Serikat.

KMB memiliki hasil, antara lain:

1. Penyerahan Kedaulatan Republik Indonesia dari Pemerintah Belanda, kecuali Irian Barat.
2. Masalah Irian Barat akan diselesaikan dalam waktu setahun

---

<sup>38</sup> Moedjanto. *Op. Cit* Halm

3. Dibentuknya persekutuan Belanda-Indonesia , Republik Indonesia Serikat (RIS)
4. Pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat
5. Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat tanpa syarat dan tidak dapat dicabut. Sehingga mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.
6. Kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949.

## **2.2 Masa RIS ( Republik Indonesia Serikat)**

Pada tanggal 14 November 1949, rombongan delegasi Indonesia dibawah pimpinan Muhammad Hatta, tiba kembali di Yogyakarta. Hasil-hasil konferensi Meja Bundar perlu di ratifikasi oleh semua negara dan daerah otonom yang akan menjadi anggota RIS, dalam hal ini oleh pemerintah Indonesia dan semua negara-negara federal bentukan van Mook. Kemudian pada tanggal 16 Desember 1949 di Yogyakarta, Panitia Pemilihan Nasional RIS memilih Ir. Soekarno menjadi Presiden Indonesia Serikat dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Pada tanggal 19 Desember 1949, kabinet RIS terbentuk dengan Susunan sebagai berikut:

1. Perdana Menteri : Mohammad Hatta
2. Menteri Luar Negeri : Mohammad Hatta
3. Menteri Pertahanan : Hameng kubuwono IX
4. Menteri Dalam Negeri : Ida Anak Agung Gde Agung

5. Menteri keuangan : Mr. Syafruddin Prawiranegara
6. Menteri Perekonomian : Ir. Juanda
7. Menteri Perhubungan dan Pekerjaan Umum ; Ir.Herling Laoh
8. Menteri kehakiman : Prof. Dr.. Mr.Supomo
9. Menteri Pendidikan dan kebudayaan : dr. Abu Hanifah
10. Menteri kesehatan : dr, Josef Leimena
11. Menteri Pemburuan : Mr. Wilopo
12. Menteri Sosial : Mr. kosasih Purwanegara
13. Menteri Agama : k. H Wahid Hasyim
14. Menteri Penerangan : Arnold Mononutu
15. Menteri Negara : Sultan Hamid II, Mr. Mohammad Roem dan Dr. Suparno

Upacara penyerahan kedaulatan dari kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, pada 27 Desember 1949, berlangsung khidmat di dua tempat, di Amsterdam Belanda dan di Jakarta, Indonesia. Di Amsterdam penyerahan kedaulatan de facto dan de jure dilakukan langsung oleh kepala Negara Belanda Ratu Juliana Kepada wakil presiden dan perdana Menteri RIS Mohammad Hatta, tepat pada pukul 10.00 waktu Amsterdam. Pada saat bersamaan, yaitu pada pukul 17.00 WIB, dilangsungkan upacara penyerahan kedaulatan de facto dan de jure dari wakil tertinggi Ratu Belanda di Hindia-Belanda, A.H.J. Lovink, kepada Wakil Perdana

Menteri RIS, Sultan Hamengku\_Bowono IX, didampingi Muhammad Roem.<sup>39</sup>

Mulailah negara-negara lain mengadakan pertukaran duta besar dengan RIS.

Konstitusi RIS disepakati dalam KMB antara delegasi Republik Indonesia dengan BFO. Dalam konstitusi RIS tersebut bentuk negara Indonesia adalah Republik Indonesia Serikat (RIS) yang terdiri 16 Negara bagian yakni: (1) Negara bagian Republik Indonesia (Yogyakarta), (2) Negara bagian Kalimantan Barat, (3) Negara bagian Indonesia Timur, (4) Negara bagian Madura, (5) Negara bagian Banjar, (6) Negara bagian Bangka, (7) Negara bagian Belitung, (8) Negara bagian Dayak Besar, (9) Negara bagian Jawa Tengah, (10) Negara bagian Jawa Timur, (11) Negara bagian Kalimantan Tenggara, (12) Negara bagian Kalimantan Timur, (13) Negara bagian Pasundan, (14) Negara bagian Riau, (15) Negara bagian Sumatera Selatan, (16) Negara Bagian Sumatera Timur (NST).<sup>40</sup>

Sistem pemerintahan federal sesuai dengan KMB ternyata tidak berumur panjang Pengakuan yang dilakukan pada tanggal 27 Desember 1949, itu justru mendorong gerakan persatuan yang bukan saja muncul di kalangan elit Indonesia. Tetapi juga di kalangan masyarakat bawah sendiri. Hal tersebut dikarenakan banyak bangsa Indonesia yang menganggap sistem federal adalah warisan kolonial.<sup>41</sup> Banyak pegawai negeri sipil dalam negara bagian lebih taat kepada aturan-aturan dari ibukota RI Yogyakarta, dari pada Jakarta. Kondisi itu menimbulkan administrasi

---

<sup>39</sup> Lukman Hakim. *Biografi Muhammad Natsir (Kepribadian, Pemikiran, dan Perjuangan)*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar. Halm 216

<sup>40</sup> Ahmad Murjoko. *Mosi Integral Natsir 1950*, Bandung : Persis Pers Halm 63

<sup>41</sup> Haryono rinardi. *Op. Cit.* Vol 2. No 1

ganda yang membingungkan, Keadaan itu sesungguhnya merupakan bentuk manifestasi politik pada masa sebelumnya. Pembentukan negara-negara bagian di berbagai wilayah Indonesia oleh Belanda serta eksistensinya tidak pernah diakui oleh RI di Yogyakarta. Selain itu RI mendirikan pemerintahan daerah bayangan dari desa sampai ke kota, pemerintah RI juga mengirim uang-uang ORI (Oeang Republik Indonesia) dan adanya kelancaran administrasi Pemerintah.

Dengan kondisi itu, tidak heran banyak pejabat-pejabat daerah atau negara bagian yang lebih berkiblat kepada Yogyakarta dari pada ke Jakarta. Kondisi itu semakin diperparah dengan kuatnya kelompok republiken di tubuh kabinet Perdana Menteri Muhammad Hatta. Soekarno dan kaum republiken lainnya dalam tubuh pemerintah RIS banyak memberikan dorongan semangat kepada gerakan penyatuan di berbagai daerah atau negara bagian. Seluruh kabinet Muhammad Hatta yang bersungguh-sungguh mendukung RIS hanya Sultan Hamid II dan Anak Agung Gde Agung.

Sebagian besar Masyarakat Indonesia tidak puas dengan federal hasil KMB. Ketidakpuasan itu kemudian diwujudkan dengan bentuk tuntutan agar negara-negara bagian bersatu dengan RI atau RIS. Pemimpin-pemimpin RI dan orang-orang RI yang duduk dipusat menanggapi keinginan mereka secara positif dan terang-terangan, keinginan bergabung dengan RI dan melebur RIS menjadi makin keras, terlebih-lebih

setelah negara Belanda ditarik mundur dari negara-negara bagian dan politisi-politisi di negara-negara bagian yang ditahan karena pro RI dibebaskan.<sup>42</sup>

Kedudukan golongan pro RIS (federal) menjadi lebih buruk karena diantara mereka ada yang berlaku jahat terhadap RIS sendiri. Diantaranya adalah Sultan Hamid dari Kalimantan Barat yang menjabat Menteri negara ia bersekongkol dengan Westerling, pembantai rakyat di Sulawesi Selatan, yang dengan APRAny yang berkekuatan kira-kira 800 tentaranya hendak menolong Hamid untuk membunuh Menteri Pertahanan Sultan Yogya., Sekretaris Kementerian tersebut, Ali Budiharjo, dan Kepala Staf Angkatan Perang, Kolonel Simatupang. APRA adalah singkatan dari Angkatan Perang Ratu Adil.

Pada tanggal 23 Januari 1950 Westerling dan sekitar 800 orang tentaranya merebut tempat-tempat penting di Bandung ibukota negara Pasundan, tetapi Komisaris Tinggi mendesaknya supaya mundur pada hari itu juga. Hari berikutnya diketahui bahwa Westerling merencanakan untuk menyerang kabinet RIS dan membunuh beberapa orang menteri. Tentara-tentara Westerling yang telah menyusup memasuki Jakarta setelah meninggalkan Bandung, tetapi mereka dapat dipukul mundur. Pada bulan Februari 1950 meninggalkan Negari ini dengan jalan menyamar. Timbul kegoncangan yang meluas atas terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut.<sup>43</sup>

Rakyat menuntut dibubarkannya pemerintahan Negara Pasunda karena beberapa pemimpin Pasunda dicurigai terlibat komplotan Westerling. Untuk

---

<sup>42</sup> Moedjanto. *Op. Cit* Halm 70

<sup>43</sup> M.C. Ricklef. *Op. Cit.*, Halm 351

menanggapi keinginan rakyat pemerintah RIS mengeluarkan undang-undang darurat pada 8 Februari 1950. Dengan undang-undang darurat itu pemerintah Pasundan di bawah Wali Negara (Presiden) Wiranatakusuma, baru menyerahkan kekuasaannya kepada Komisaris Negara RIS.

Apa yang terjadi di Pasundan kemudian diikuti oleh Sumatera Selatan. DPR Sumatera Selatan pada 10 Februari memutuskan untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah pusat RIS di Jakarta. Negara-negara lain kemudian menyusul, tetapi kebanyakan cenderung untuk bergabung dengan RI daripada dengan RIS sendiri. Karena tuntutan bergabung dengan RI makin meluas, DPR RIS dengan dukungan kaum federalis mendukung dikeluarkannya undang-undang darurat pada 7 Maret yang mengatur bagaimana penggabungan suatu negara bagian dengan RI dapat dilakukan. Setelah ini maka pemerintah-pemerintah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Madura diterima keinginannya untuk bergabung dengan RI. Pada akhir maret 1950 tinggal 4 negara bagian saja dalam RIS yaitu Kalimantan Barat, Sumatera Timur, NIT, dan RI yang telah diperluas.

Keadaan di NIT agak berlainan, setelah berlangsungnya demokrasi rakyat menuntut pembubaran NIT dan Penggabungan dengan RI, serta dalam DPR yang menyokong demonstran, pemerintah NIT bertindak keras, tokoh-tokoh pro RI dipenjarakan atas perintah Menteri Kehakiman Soumokil. Karena hal tersebut tentara RI datang ke NIT, tetapi kedatangan di hadang oleh 2 kompi pasukan NIT dibawah pimpinan Kapten Andi Aziz dan mereka menawan sejumlah kecil pasukan pro RI di Ujung Pandang serta menguasai kota itu. Aziz berbuat demikian untuk

mempertahankan NIT. Sejumlah politisi memperingati Aziz untuk tidak menentang pusat tetapi tidak berhasil.

Presiden Soekarno pada 13 April mencap Aziz sebagai pemberontak, ia berhasil ditangkap pada 21 April 1950, penjara di buka dan golongan pro RI Menang. Sementara itu Soumokil, yang seperti pemimpin-pemimpin NIT menyaksikan kekuatan militer RIS yang menggabungkan pada RI, mengundurkan diri dari Ambo dan memproklamasikan RMS (Republik Maluku Selatan) pada 25 April 1950. Pemimpin RMS menyatakan kalau RIS telah melanggar ketentuan-ketentuan KMB.<sup>44</sup>

RMS telah menyebabkan hubungan RIS (RI) Belanda menjadi buruk karena jelas Belanda membantu RMS. Sementara itu gerakan menuju ke persatuan dengan RI berkembang cepat. Pada 21 April Presiden Sukawati memaklumkan kesediaan NIT untuk bergabung dengan RI menjadi negara kesatuan. Pernyataan serupa bermunculan, mulai dari daerah Minahasa, kemudian daerah-daerah lain kecuali RMS.

Sehubung dengan itu maka diadakan konferensi yang dihadiri oleh wakil-wakil RIS, yang mewakili juga Sumatera Timur dan NIT, dengan wakil-wakil RI di Jakarta, konferensi mencapai persetujuan pada 19 Mei 1950 dan ketentuannya adalah perubahan Konstitusi RIS. Dimana dalam pasal 1 disebutkan bahwa “Konstitusi Sementara RIS diubah menjadi UUD Sementara RI”.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>Moedjanto. *Op. Cit* Halm 72

<sup>45</sup>Haryono rinaldi. *Op. Cit*. Vol 2. No.1